E-ISSN XXXX-XXXX
P-ISSN XXXX-XXXX
Volume 1 Nomor 1 2023

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE
ON INDONESIAN PHILOSOPHY AND THEOLOGY
"Etika dan Persoalan Moral Kontemporer di Indonesia"
Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Jika Tuhan Tidak Ada, Segala Sesuatu Diperbolehkan? Tinjauan Kritis akan Moralitas Manusia Dihadapan Ateis

Kristoforus Akri Deodatus [a,1]

[a] *Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*
[1] *186114059@student.usd.ac.i d*

KEYWORDS:
Jean-Paul Sartre, Imago Dei, Jiwa, Roh, Allah

ABSTRACT

This article examines Jean-Paul Sartre's materialistic atheism perspective on the rejection of God's existence and its implications on human freedom and morality. Sartre argues that the existence of God limits human freedom, hence humans must pursue their existence without the presence of God. However, the article also explores criticisms of Sartre's views, indicating that the absence of God in moral thought can lead to ethical dilemmas, especially in the context of law and justice. Additionally, the article discusses Sartre's failure to acknowledge the impact of God's absence on metaphysical authority and human sacred identity. Through its analysis, the author aims to highlight the complexity of the relationship between the existence of God, human freedom, and the foundation of morality.

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji pandangan ateisme materialistik Jean Paul-Sartre terhadap penolakan eksistensi Tuhan dan implikasinya terhadap kebebasan dan moralitas manusia. Sartre berpendapat bahwa keberadaan Tuhan membatasi kebebasan manusia, sehingga manusia harus mengejar eksistensinya tanpa keberadaan Tuhan. Namun, tulisan ini juga mengeksplorasi kritik terhadap pandangan Sartre,

DOI: https://doi.org/10.24071/8369
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/senafil
Email: seminarfilsafat.teo@usd.ac.id

This work is licensed under a CC BY-SA
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

menunjukkan bahwa ketiadaan Tuhan dalam pemikiran moral dapat mengarah pada dilema etis, terutama dalam konteks hukum dan keadilan. Selain itu, tulisan ini juga membahas kegagalan Sartre dalam mengakui dampak ketiadaan Tuhan terhadap otoritas metafisik dan identitas sakral manusia. Melalui analisisnya, penulis berusaha untuk menyoroti kompleksitas hubungan antara keberadaan Tuhan, kebebasan manusia, dan fondasi moralitas.

Pendahuluan

Penolakan terhadap eksistensi Tuhan telah dimulai jauh sebelum abad ke-17, namun intensitasnya semakin kuat dirasakan dari abad 17 sampai saat ini. Ada berbagai alasan penolakan-penolakan dari manusia. Penolakan-penolakan itu berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang sekuler dalam perubahan zaman, yang memunculkan keyakinan akan Tuhan dibaluti dengan dunia serba materil. Misalnya kaum ateisme melancarkan gagasannya akan keberadaan Sang Pencipta. *Pertama*, kategori kejahatan dan pendertiaan. Beberapa orang telah menolak keberadaan Tuhan, karena adanya kejahatan dan penderitaan di dunia ini yang terus berlangsung. Misalnya keberatan yang dipertanyakan oleh Fyodor Dostoevski, yaitu: *How it is possible for an all-powerful, all good God to permit suffering in the world.* [1] B.C. Johnson juga mengatakan karena ada kejahatan dan penderitaan, maka, *'…God Cannot be all good and (by implication) that the God of traditional theism is incoherent'.*[2] *Kedua*, kategori kebebasan manusia. Percaya kepada Tuhan menghambat kebebasan manusia. Sebab Tuhan tidak ada segalanya mungkin demikian dikatakan Dostoevski. Begitu pun Jean Paul Sartre mengungkapkan, "Karena manusia bebas, maka Allah tidak boleh ada. Jika ada Allah, maka manusia tidak memiliki kebebasan. Mengapa? Karena Allah telah mentakdirkan manusia itu dari awalnya, sehingga manusia tidak bebas atau tidak dapat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan dirinya. Maka, manusia hanya dapat mengembangkan eksistensinya saja."[3]

[1] H. Gordon Clark, *Thales to Dewey,* (Maryland: The Trinity Foundation, 1985), 489.
[2] F. William Lawhead, *Philosophical Questions,* (New York: McGraw, 2003), 106.
[3] Jean Paul Sartre*, Being and Nothingness,* (Washington: Square Press, 1966), 559-711.

Melalui tulisan ini, penulis memilih salah satu pemikiran tokoh ateisme yang di sebutkan di atas, yakni penulis memilih pandangan Sartre yang mendistorsi keberadaaan Tuhan dihadapkan dengan perspektif ateisme materialistiknya. Berikut sebagaimana Sartre memberi gagasan akan logika berpikirnya.

Pandangan Jean Paul-Sartre[4]

Dalam pemikiran Jean Paul-Sartre akan penolakan terhadap keberadaan Tuhan, ia mengutarakan gagasannya melalui ide materialistiknya. Ide materialistik Sartre, yakni memandang dunia sebagai materi sehingga tidak ada tempat untuk Tuhan di alam semesta. Hal ini dihadapkan dengan eksistensi manusia, yang menurut Sartre percaya kepada Tuhan menghambat eksistensi manusia akan kebebasannya. Sartre beranggapan bahwa, "Jika Tuhan tidak ada segalanya mungkin", maka Tuhan tidak boleh ada. Jika ada Tuhan, maka manusia tidak memiliki kebebasan. Mengapa? Karena Tuhan telah mentakdirkan manusia itu dari awalnya, sehingga manusia tidak bebas atau tidak dapat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan dirinya. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengembangkan eksistensinya saja "tanpa adanya kekebebasan".

Sartre menggambarkan keberadaan manusia dengan membedakan antara "berada-pada-dirinya sendiri" (*entre en soi*) dan "berada-bagi-dirinya sendiri (*entre pour soi*). Bagi Sartre manusia sebagai *entre pour soi*, maka ia tidak mempunyai hakekat yang pasti, terlempar dalam eksistensi. Eksistensinya mendahului esensinya. Ia bebas, tidak terdeterminasi. Ia memproyeksikan diri melalui kebebasan, maka melalui kebebasan, ia "menjadi". Dalam kajian Sartre lebih menukik akan kebebasan manusia Sartre mempertanyakan satu hal yang berkaitan dengan keberadaan Tuhan, yaitu "Kebaikan dan Kejahatan" sebagai moralitas absolut. Gagasan Sartre ini dihadapkan dengan "ateisme materialistik akan dunia yang dilihat tanpa Tuhan." Sartre pun memberikan tanggapan bahwa aliran ateismenya berkembang dari sekadar "ketiadaan ide" menjadi sebuah konsepsi baru tentang keberadaan dan manusia, khususnya, yang "ditinggalkan di antara segala sesuatu dan tidak dipisahkan dari mereka oleh kesadaran ilahi yang merenungkan mereka dan menyebabkan mereka ada". Seperti realitas

[4] Disarikan dari Marcos Antonio Norris. "The Failed Atheism of Jean-Paul Sartre," *The Heythrop Journal* (2021): 1-7.

material lainnya, manusia tidak memiliki tujuan moral di alam semesta. Oleh karena itu, seorang ateis materialistis, dalam terang pengetahuan ini, akan menciptakan nilai-nilai moral jika mereka menginginkannya, tetapi mereka akan melakukannya tanpa jatuh dalam kecenderungan otoriter untuk menganggap baik dan jahat sebagai prinsip-prinsip transendental.

Melalui pemikirannya, Sartre membedakan diri dari kelompok ateisme yang idealis. Sartre menyebut perspektifnya sebagai ateisme materialistis karena bergerak melampaui ateisme idealis yang sama-sama menolak gagasan tentang Tuhan untuk mempertimbangkan kembali sifat alamiah dari makhluk material tanpa kehadiran Tuhan. Dalam pandangan ini, ateisme idealis melihat manusia, seperti halnya semua realitas material, ada hanya karena kebetulan bukan karena rancangan Tuhan, sehingga orang yang tidak percaya harus melepaskan diri dari pandangan teologis bahwa manusia diciptakan dengan nilai yang melekat untuk tujuan moral. Gagasan Sartre dalam alam semesta yang diatur secara ilahi, akan terlihat bahwa moral absolut dibangun ke dalam sifat metafisik makhluk. Hal ini mengartikan, tidak hanya sebagai keyakinan aksiologis yang dipaksakan pada ciptaan dari atas, tetapi sebagai bagian dari realitas material itu sendiri. Inilah sebabnya, mengapa bisa dibilang tidak ada moral yang mutlak di dunia tanpa Tuhan. Sifat realitas bergantung pada pencipta ilahi yang ketiadaannya menghasilkan yang menurut Sartre alam semesta yang netral secara moral.

Kritik Terhadap Teori Jean Paul Sartre

Gagasan Sartre tentang eksistensi manusia hanya terbatas pada keberadaannya di dunia. Sartre menyebut perspektif ini sebagai ateisme materialistis karena bergerak melampaui ateisme idealis (menolak gagasan tentang Tuhan) untuk mempertimbangkan kembali sifat alamiah dari makhluk material tanpa kehadiran Tuhan. Dalam pandangan ini, manusia, seperti halnya semua realitas material, ada hanya karena kebetulan, bukan karena rancangan Tuhan, sehingga orang yang tidak percaya harus melepaskan diri dari pandangan teologis bahwa manusia diciptakan dengan nilai yang melekat untuk tujuan moral.

Sebagaimana realitas material lainnya, manusia tidak memiliki tujuan moral di alam semesta, sehingga seorang ateis materialistis. Dalam terang pengetahuan ini akan tercipta nilai-nilai moral jika mereka menginginkannya. Kendati demikian, mereka akan melakukannya tanpa

jatuh ke dalam kecenderungan otoriter untuk menganggap baik dan jahat sebagai prinsip-prinsip transendental. Oleh karena itu, keputusan yang berdaulat adalah sebuah instantiasi teologis yang sekuler dari keberadaan dalam-dirinya-untuk-dirinya yang menggantikan Allah dengan identitas manusia atau *imago Dei*. Hal ini mengartikan adanya suatu absolut relatif yang melegitimasi otoritasnya sendiri hanya dengan mengakui dirinya sendiri sebagai otoritatif. Sartre menggantikan Tuhan dengan manusia sebagai pusat moral alam semesta; individu yang bebas mengesahkan nilai dari keputusannya. Lebih lagi, hanya dengan membuat pilihan apa pun yang dia buat. Singkatnya, individu yang berdaulat tidak dapat melakukan kesalahan. Namun, dihadapkan dengan sistem demokrasi dalam suatu negara akan hidup masyarakat yang berada dalam tatanan hukum, sebenarnya terdapat kesenjangan antara norma dan keputusan.

Norma bisa kita artikan sebagai konstituen (kekuatan pembentuk konstitusi) yaitu kehidupan masyarakat. Sedangkan keputusan bisa kita artikan sebagai *constituted power*, yaitu tatanan hukum atau konstitusi yang ke sananya melahirkan penyelenggaraan kekuasaan, yang di dalam sistem demokrasi modern adalah *trias politica*.[5] Kombinasi keduanya ini melahirkan tatanan hukum yang berasal dari masyarakat. Namun dalam praktiknya, konstituen sebenarnya tidak berada di dalam tatanan hukum. Karena keputusan hukum sudah selalu ada di tangan kedaulatan.

Kendati demikian, keniscayaan yang dimiliki kedaulatan hanya terlihat jelas di dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, aspirasi konstituen tidak lagi dipertimbangkan, karena yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan untuk normalisasi. Untuk normalisasi, eksekutif berhak melakukan apapun demi melindungi kedaulatan konstitusi. Artinya kedaulatan muncul terang-terangan saat ia harus melindungi struktur dirinya (konstitusi). Kedaulatan adalah yang menciptakan keputusan di dalam *state of exception*.[6] Namun, kedaulatan bersifat paradoksal. Kedaulatan sama sekali bukan bagian dari konstitusi, tetapi ia mengafirmasi diri di dalam konstitusi sebagai struktur yang menopangnya. Kedaulatan ditopang konstitusi tetapi di sisi lain ia berdiri sendiri. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan super untuk menangguhkan tatanan hukum. Agamben menyebut kedaulatan sebagai, "Sesuatu yang berada di luar sekaligus di dalam tatanan konstitusi." Menurut Agamben sebenarnya masyarakat yang

[5] Abdul Karim, "Imanensi Fasisme dan Kedaulatan: Kritik Giorgio Agamben atas State of Exception", Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 5, No. 2, (2020), 163

[6] Abdul Karim, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), 164.

ada di dalam tatanan hukum itu sama dengan manusia yang ada dalam kamp. Mereka bisa mendapatkan kekerasan tanpa diberikan perlindungan hukum. Pada dasarnya kedaulatan bisa saja mengambil nyawa manusia yang ada dalam spektrum kekuasannya tanpa mendapatkan hukuman sama sekali, karena kedaulatan itu sendiri lah yang menjadi hukum.[7]

Di sini Sartre gagal menyadari dampak penuh dari ketidakberadaan Tuhan dibuktikan dengan otoritas metafisik yang jika dikaitkan dengan pilihan berdaulat. Pilihan berdaulat adalah keadilan bagi manusia, tentu hal ini dihadapkan dengan perilaku baik atau jahat itu. Manusia berbuat jahat harus di hukum. Jika hukum sampai pada memusnahkan hidup manusia apakah ini masih di sebut sebagai moralitas yang baik? Apakah ini masih disebut dengan pilihan berdaulat? Tampaknya Sartre tidak dapat sepenuhnya meninggalkan keyakinannya akan identitas manusia yang sakral, tanpa adanya Tuhan di surga yang menciptakan manusia sebagai *imago Dei*. Identitas manusia yang sakral itu harus terputus dari sumbernya yang ilahi dan asli. Karena alasan ini, hak asasi manusia tidak dapat lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang ditanamkan dalam diri manusia oleh Tuhan yang menciptakan hak-hak tersebut. Kendati demikian, harus dipahami sebagai realitas yang berasal dari diri sendiri. Hal ini mengartikan bahwa realitas apriori tidak memiliki sumber otorisasi di luar keberadaannya. Oleh karena itu, meskipun tidak memiliki pembenaran yang logis, hak asasi manusia menjadi otorisasi diri. Sementara subjek yang berdaulat dan pencipta manusia menjadi yang bertanggung jawab untuk menandai hubungan yang tepat dari hak-hak tersebut. Eksistensialisme Sartre menjalin dirinya sendiri ke dalam jaring kontradiksi yang kusut dengan melestarikan *imago Dei* sambil menghilangkan Tuhan. Hasil dari operasi yang tidak logis ini adalah pandangan sekuler tentang pilihan moral yang berdaulat yang menekan ke dalam pikiran bawah sadar sebuah elemen teologis yang diperlukan.

Jika Tuhan Tidak Ada, Segala Sesuatu Diperbolehkan?

Melihat pembahasan di atas, ada dua catatan penting bagi penulis, yaitu: pemikiran Sartre tentang Tuhan dan kekebasan menampilkan peluang untuk dikritisi gagasannya. *Pertama*, Sartre yang tidak mengakui

[7] Giorgio Agamben, *State of Exception,* diterjemahkan oleh Kevin Attell, (Chicago: Chicago Universit: Press, 2005), 34.

keberadaan Tuhan telah mengaburkan eksistensi manusia dari asalnya. Perlu diketahui bahwa manusia tidak bisa hadir di dunia ini tanpa adanya roh yang dihembuskan kepadanya. Karenanya, tidak ada satu materipun di dunia ini yang dapat menjadikan dirinya sendiri sebagai mahkluk hidup, paling cepat materi berubah menjadi energi (E=MC2).

Atau sejauh ilmu pengetahuan yang ada sekarang, tidak dapat menciptakan materi menjadi mahluk hidup. Maka dari itu, harus ada roh yang menghidupkan materi (tubuh) agar dapat menjadi mahluk hidup (manusia). Jika harus ada roh yang menghidupkan materi agar dapat menjadi mahluk hidup, maka terbuka pemikiran adanya dunia roh. Kecuali, jika ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa materi dapat menjadi mahluk hidup tanpa harus ada roh. Jika diterima adanya dunia roh, maka terbuka pemikiran tentang adanya Roh Pencipta dari roh-roh tersebut. Jika roh yang menghidupkan materi tersebut berasal dari Roh Pencipta, yakni Tuhan.

Roh sebagai kapasitas, fungsi atau tindakan, itu bukanlah roh, tetapi jiwa. Mengapa? Karena manusia diciptakan terdiri dari dua substansi, yaitu tubuh (materi) dan roh. Tubuh merupakan perangkat keras (*hardware*) dan roh merupakan perangkat lunak (*software*), akibat pertemuan keduanya maka manusia menjadi mahluk hidup. Sebagai mahluk hidup, manusia memiliki rasio, kehendak dan emosi, yang muncul sebagai realitas yang berpotensi ada (posrealitas).[8] Rasio, kehendak, dan emosi tersebut adalah jiwa, yang bukan realitas tetapi posrealitas. Sebab realitas sesungguhnya adalah tubuh dan roh. Itu sebabnya ketika manusia mati, maka rohnya kembali kepada Tuhan, dan tubuhnya kembali ke debu (materi). Jiwa ada dimana? Jiwa sebenarnya melekat pada roh, namun ia dapat terlihat atau nyata, ketika ada pertemuan antara tubuh (materi) dengan roh. Jika hanya roh saja tanpa tubuh, maka jiwa tidak terlihat dengan jelas manifestasinya. Oleh karena itu, jiwa merupakan fungsi dari roh, itu sebabnya ketika tubuh mati, fungsi roh (baca: jiwa) itu serasa lenyap karena ia kembali ke realitas

[8] Posrealitas adalah realitas yang berpotensi ada. Aristoteles menjelaskan ada empat penyebab terjadinya realitas yang berpotensi ada yaitu: pertama, causa formalis (sebagai penyusun bahan); causa finalis (tujuan yang menjadi arah suatu wujud); causa effeciens (motor penggerak); causa materialis (bahan dari suatu benda). Bila disesuaikan dengan rumus Aristoteles tersebut, maka jiwa merupakan realitas yang berpotensi ada, sebab causa materialisnya adalah tubuh, causa efficiensnya adalah roh, causa formalisnya adalah bentuk manusia; causa finalis adalah manusia yang memiliki jiwa (emosi, kehendak rasio). Frederick Copleston, *A History of Philosophy,* (New York: Image Books, 1993), 306-307

aslinya yakni roh. Pengertian jiwa akan dapat lebih tegas lagi terlihat melalui pendapat William Dyrness. Ia mengatakan, "Jiwa adalah individu yang hidup, bukan dalam arti roh yang tak dapat binasa, melainkan hidup fisik yang konkret dan sarat dengan berbagai kebutuhan."[9]

Kedua, moralitas tidak mungkin tanpa Tuhan. Hal ini dikarenakan bahwa moralitas tanpa Tuhan itu berarti moralitas yang hanya terjadi dalam kebebasan manusia dari ukuran pribadinya saja. Tentu ini mengaburkan moralitas dari Sartre yang memandang kebaikan dan kejahatan dengan menghadapkan pilihan yang berdaulat. Sedangkan pilihan berdaulat sudah membatasi kebebasan manusia dengan normalitas tertentu. Menurut penulis, yang di maksudkan Sartre kebebasan manusia masih sangat abstrak. Realitas yang terjadi dunia sudah mempunyai hukum alam yang telah membatasi kebebasan manusia untuk menemukan dirinya. Hal ini dikarenakan keberadaan manusia di dunia hanya mengembangkan eksistensinya saja tanpa suatu tujuan yang jelas. Ia menentukan pilihan bebas menurut kemauan batas dan kemauan sendiri, namun kenyataannya hidup manusia berada dalam hukum dan peraturan.

Hukum dan peraturan menentukan tujuan manusia untuk membatasi kebebasan manusia. Sejak manusia lahir sudah ada batasan-batasan pada diri manusia. Misalnya, untuk pilihan akan kesehatan pribadi sudah membatasi kebebasan manusia begitu pun dengan jaringan sosial kehidupannya. Maka dari itu, sampai pada titik ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap tindakan tidak harus mempertanyakan keberadaan Tuhan. Hal ini dikarenakan bahwa Tuhan jauh dari nalar manusia. Setiap moralitas telah melekat dalam pribadi manusia yang di ciptakan oleh Sang Ilahi dalam *imago Dei*. Dengan demikian, manusia tidak semena-menanya melakukan segala sesuatu tanpa melepaskan Tuhan yang memberi kehidupan pada dirinya.

Daftar Pustaka

Agamben Giorgio. *State of Exception,* diterjemahkan oleh Kevin Attell, Chicago: Chicago University Press, 2005.

Clark, Gordon H. *Thales to Dewey.* Maryland: The Trinity Foundation, 1985.

Copleston Frederick. *A History of Philosophy,* New York: Image Books, 1993.

Dyrness William. *Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama*, Malang: Gandum Mas, 1992

Karim, Abdul. "Imanensi Fasisme dan Kedaulatan: Kritik Giorgio Agamben atas State of Exception", *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), 154-171

[9] William Dyrness, Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama, Malang: Gandum Mas, 1992), 69.

Lawhead, William F. *Philosophical Questions,* New York: McGraw, 2003.
Norris Antonio Marcos. "The Failed Atheism of Jean-Paul Sartre," *The Heythrop Journal* (2021): 1-27.
Sartre Paul Jean. *Being and Nothingness,* Washington: Square Press, 1966.